

**PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC*
PLAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

ANNISA APRILIA

E061181517

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC*

***PLAN* TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA**

(STUDI KASUS: PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh :

ANNISA APRILIA

E061181517

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN* TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR)

NAMA : ANNISA APRILIA

NIM : E061181517

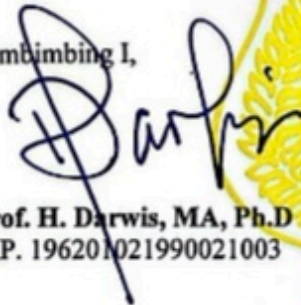
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 5 Oktober 2023

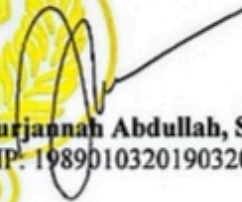
Mengetahui :

Pembimbing I,



Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,



Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN* TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR)

N A M A : ANNISA APRILIA

N I M : E061181517

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 8 September 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.E.c.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah,, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Aprilia

NIM : E061181517

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bawah skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN* TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR)

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Agustus 2023


Annisa Aprilia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, kekuatan, ilmu, pengetahuan, dan segala nikmat sehingga tugas akhir yang berjudul **”Peluang dan Tantangan Implementasi Asean Tourism Strategic Plan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Indonesia (Studi Kasus : Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)”** dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadikan skripsi ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak, dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak **Andi Erwin Hatta Sulolipu** dan Ibu **Andi Suhada Sappaile** tercinta. Terima kasih telah menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, do’a, dan perhatian yang tak terhingga dan telah menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih karena selalu memberikan kepercayaan

dan kesempatan kepada penulis untuk terus berproses dan menjadi individu yang kuat dan lebih baik. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis apapun keadaan yang terjadi. Semoga Allah SWT membalas dan memberkahi segala bentuk perhatian dan dukungan buat putri nya untuk bisa sampai di titik ini.

2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing penulis, yaitu kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membimbing, menuntun, dan mengayomi penulis dengan penuh semangat dan dukungan yang besar lewat arahan dan *insight* yang bermanfaat disetiap diskusi bimbingan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama 4 tahun ini. Menempuh pendidikan di Departemen ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan dan sangat luar biasa.
3. Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma, Pak Ridho dan Kak Salmi** yang telah banyak membantu penulis selama melakukan studi dan pengurusan berkas serta administrasi. Begitu pula dengan Staff

Akademik FISIP dan segala jajarannya yang banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas. Semoga segala pekerjaan yang telah dilakukan bernilai pahala dan diberikan kemudahan.

4. Keluarga penulis, mulai dari mama Andi Marniaty Sappaile, kakak **Gita**], kakak **Dinda**, kakak **Manda**, adik **Syira** dan **Rafi**. Terima kasih telah memberikan perhatian, dukungan, dan ‘asupan’ serta senantiasa menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar **Fadeli Luran** atas segala doa, motivasi, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk yang selalu mendukung penulis, **Sayid Hasan Jufri** terima kasih untuk segala dukungan bahkan motivasi yang diberikan untuk penulis. Terima kasih juga sudah sabar mendengar keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini dan terima kasih untuk selalu ada disaat penulis membutuhkan. *Cheers to many more Adventures.*
6. Sahabat-sahabat ku tercinta , **Zhadela, Nabil, Irham, Abi, Dinda, Ade, Afi dan Bella**. Terima kasih selalu menjadi teman yang bisa menghibur penulis disaat butuh, selalu ada buat penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada kapanpun dan dimanapun penulis membutuhkan bantuan dan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesh penulis juga tidak bosan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. *Love you guys*

7. Pimpinan saya, Ibu **Indira Jusuf Ismail**, bapak **Ramdhan Pomanto**, pak **Zuhur dg Ranca**, Ibu **Obel**. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dan terima kasih atas pengertian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu bisa sukses selalu.
8. Paling bersejarah, **Wingky**. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan di menit-menit terakhir yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tanpa anda penulis tidak bisa ada sampai di titik ini. *Syurgaki*
9. Seluruh keluarga besar PROKOPIM, terkhusus kak **Anis** dan kak **Trisna**, terima kasih sejak awal sudah memberi motivasi yang besar untuk penulis dan bisa menjadi tempat berkeluh kesah. **Nanda, Wawan, Uce, Asif, Debi** dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi teman diskusi serta membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi. *Sukses terus*
10. Seluruh teman-teman Reforma (HI Angkatan 2018), terkhusus **Matryd, Hardian, Naswan, Alwan, Faqih, dan Izha**, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik yang selalu menghibur untuk semua keluh kesah penulis sejak awal perkuliahan, Teman-

teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi teman diskusi serta membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Mega Soraya HI 19** sebagai teman seperjuangan selama seminar hasil, *Wishing you all lots of luck!*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan implementasi ATSP terhadap pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar adalah dengan adanya perputaran roda ekonomi yang cukup menjanjikan, adanya kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat menggunakan konsep pentahelix, terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona di setiap kecamatan; tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan event / kegiatan yang berskala nasional dan internasional; trend gaya hidup yang membutuhkan rekreasi; tersedianya ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi seni budaya; serta adanya *political will* dari pemerintah untuk pengembangan destinasi; Adapun tantangan implementasi adalah rendahnya tingkat persentase kontribusi pariwisata terhadap total PDRB, meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Makassar, belum tersedianya produk hukum terkait bidang kepariwisataan (RIPPARDA Kota Makassar), rendahnya fasilitas penunjang/amenitas pariwisata yang terbangun, fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi masih minim, memfokuskan kegiatan promosi bukan hanya oleh Dinas Pariwisata tapi kepada para pelaku industri pariwisata juga serta lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait

Kata kunci: ATSP, Kota Makassar, Pariwisata

ABSTRACT

This study aims to determine how the opportunities and challenges of ATSP implementation on tourism development in Makassar City. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative-descriptive method, with data collection techniques in the form of interviews and literature reviews sourced from books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research. The results of this study show that the opportunity for the implementation of ATSP for Tourism Development in Makassar City is with the rotation of the economic wheels that are quite promising, collaboration and cooperation with all elements of society using the pentahelix concept, the formation of tourism awareness groups and charm sapta in each sub-district; the availability of tourism promotion and marketing events at home and abroad; become an alternative city where national and international events / activities are held; lifestyle trends that require recreation; the availability of space and time for the organization of cultural arts attractions; and the political will of the government for the development of destinations; The implementation challenges are the low percentage of tourism contribution to the total GDP, the increase in COVID-19 cases in Makassar City, the unavailability of legal products related to the tourism sector (RIPPARDA Makassar City), the low tourism supporting facilities/amenities built, facilitation for creative economy actors that are not optimal, the number of certified tourism and creative economy sector workers is still minimal, focusing promotional activities not only by the Tourism Office but to tourism industry players as well as weak data and analysis and studies related to tourism carried out by related technical fields.

Keywords: ATSP, Makassar City, Tourism

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan Orisinilitas	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
AFTAR ISI	10
DAFTAR BAGAN	11
DAFTAR GAMBAR	13
DAFTAR SINGKATAN	14
DAFTAR TABEL	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Batasan dan Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	25
D. Kerangka Konseptual	26
E. Kerangka Pikir	30
F. Metode Penelitian	33
1. Tipe Penelitian	33
2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3. Teknik Analisis Data	34
4. Metode Penulisan.....	35
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Konsep Rezim <i>Effectiviness</i>	36
B. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism</i>)	44
BAB III GAMBARAN UMUM	55
A. Gambaran umum mengenai ATSP	55
B. Perkembangan dan Potensi Pariwisata Kota Makassar	66
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	94
A. Peluang Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar	94

B. Tantangan Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar	109
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	123
LAMPIRAN II	131
DOKUMENTASI	131

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 1 Kerangka Pikir.....	31
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Tata Pelaksanaan ATSP 2016-2025	65
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
APSC	: <i>ASEAN Political-Security Community</i>
ASAM	: <i>ASEAN Single Aviation Market</i>
ASC	: <i>ASEAN Security Community</i>
ASCC	: <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASEAN-NTO	: <i>ASEAN National Tourism Organizations</i>
ATMS	: <i>ASEAN Tourism Marketing Strategy</i>
ATRM	: <i>ASEAN Tourism Resources Management And Development Network</i>
ATSP	: <i>ASEAN Tourism Strategic Plan</i>
ATPMC	: <i>ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
DOT	: <i>Department of Transportation</i>
GSTC	: <i>Global Sustainable Tourism Council</i>
KTI	: <i>Kawasan Timur Indonesia</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MRA-TP	: <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i>
NTO	: <i>National Tourism Organization</i>
PAD	: <i>Pendapatan Daerah</i>
PDB	: <i>Pendapatan Domestik Bruto</i>
PDRB	: <i>Pendapatan Domestik Regional Bruto</i>
RIPPAR	: <i>Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata</i>
RIPPARDA	: <i>Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah</i>
SDM	: <i>Sumber Daya Manusia</i>
UNESCO	: <i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNWTO	: <i>United Nations World Tourism Organization</i>
WCED	: <i>World Commission on Environment and Development</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Operasional	31
Tabel 3.1 Visi dan Arah strategis ASEAN Tourism.....	56
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata	77
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Daya Tarik Wisata	79
Tabel 3.4 Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Nusantara Tahun 2017-2021	80
Tabel 3.5 Angka Kunjungan Wisatawan Nusantara Kota Makassar Tahun 2017 - 2021	81
Tabel 3 6 Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kota Makassar Tahun 2017 - 2021 .	82
Tabel 3 7 Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Daya Saing Wisata.....	83
Tabel 3 8 Lama Tinggal Wisatawan pada Tahun 2017-2021	84
Tabel 3 9 Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah	84
Tabel 3.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Saaran Renstra K/L....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nations* adalah organisasi politik yang berada di kawasan Asia Tenggara dan bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN terdiri dari lima negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia. Kemudian, disusul beberapa negara lainnya seperti Brunei Darussalam yang bergabung pada tahun 1984, Vietnam tahun 1995, Laos tahun 1997, Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1999. Mulanya, gagasan mengenai berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Namun, mereka menyadari bahwa kerjasama regional begitu penting untuk dikembangkan agar dapat menghindari potensi konflik kawasan di masa depan.

Selain itu, Asia Tenggara memiliki sumber daya wisata budaya alam, nyata dan tidak berwujud yang kaya dan beragam serta terletak di daerah pedesaan dan perkotaan. Terdapat beberapa situs warisan alam dan warisan budaya yang terletak di kawasan ASEAN, dimana hal ini tertulis pada *UNESCO World Heritage List* yang menyoroti dan mencerminkan warisan uniknya. Diliputi oleh warisan alamnya adalah budaya etnis endemik yang

kaya dan beragam dengan hampan pengaruh Arab, Cina, India, dan Eropa (ASEAN, 2015). Oleh karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh Asia Tenggara maka terdapat upaya pembentukan masyarakat ASEAN agar integrasi kawasan Asia Tenggara dapat dimaksimalkan dan menjadi cita-cita bersama negara-negara di Asia tenggara.

Pembentukan masyarakat ASEAN sebagai sebuah cita-cita bersama negara-negara di Asia Tenggara didasarkan pada tiga pilar, yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)*, *ASEAN Security Community (ASC)*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. Sebagai panduan, maka disusunlah *master plan* tentang *ASEAN Connectivity* yang berisi tentang target pencapaian dan hambatan yang berpotensi mengganggu terwujudnya *ASEAN Community*. Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam master plan ini memiliki strategi untuk menghubungkan ASEAN menjadi lebih erat, yaitu *physical connectivity*, meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur fisik; *institutional connectivity* mencakup institusi yang efektif, proses, dan mekanismenya; serta *people-to-people connectivity*, yaitu peningkatan interaksi antarwarga negara di negara-negara ASEAN (Halim, 2020).

Konektivitas ASEAN yang berfokus pada *people-to-people connectivity* dilakukan, salah satunya, melalui sektor pariwisata. Pariwisata merupakan instrumen penting yang perlu diperhatikan keberadaannya oleh negara. Pasalnya, sektor pariwisata berpotensi besar dalam menyumbangkan devisa atau dengan kata lain bahwa pariwisata berpotensi dan berperan penting

sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, tidak sedikit beberapa negara mengandalkan dan mengembangkan sektor pariwisatanya dikarenakan urgensi tersebut.

Dengan memaksimalkan sektor pariwisata, maka diharapkan negara dapat mendorong pemasukan devisa negara secara masif dan berdampak pada ekonomi nasional. Namun, dalam mengembangkan sektor pariwisata, dibutuhkan beberapa peninjauan dan perencanaan yang matang agar implementasi kebijakan dapat terealisasi secara efektif, efisien serta sesuai dengan kultur budaya yang dimiliki masyarakat atau wilayah setempat. Oleh karena itu, ASEAN berupaya untuk mengintegrasikan konektivitas antarnegara-negara anggota agar memudahkan akses pariwisata kawasan sehingga ASEAN mengeluarkan blueprint yang berjudul *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* (Halim, 2020).

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) merupakan landasan dari *ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS)*, yang diadopsi oleh menteri pariwisata negara-negara ASEAN pada tahun 2012. ATSP secara umum bertujuan untuk membangun blueprint terkait dengan kebijakan, program, dan proyek dalam area pemasaran, pengembangan produk, standar, pengembangan SDM, investasi, dan komunikasi antarnegara anggota ASEAN. Pembentukan ide komunitas ASEAN pun merupakan keputusan kolektif pemimpin ASEAN sehingga negara-negara anggota memiliki

kewajiban untuk ikut serta dalam menyukseskan hal tersebut. Berikut ini daftar kunjungan pariwisata ke negara-negara yang ada di ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1.1 Perbandingan ke Negara-negara ASEAN

Year	Brunei Darussalam	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Viet Nam	Total ASEAN
2002	890,688	786,524	4,913,835	735,662	13,292,010	217,212	1,932,677	7,567,110	10,799,067	2,627,988	43,762,773.32
2003	944,130	701,014	4,370,908	636,361	10,576,915	597,015	1,907,226	6,127,029	10,082,109	2,428,735	38,371,442.40
2004	118,863	1,055,202	5,321,165	894,806	15,703,406	656,910	2,291,352	8,375,094	11,737,413	2,927,873	49,082,084.00
2005	127,142	1,421,615	5,002,101	1,095,315	16,431,055	660,206	2,623,084	8,942,408	11,516,936	3,467,757	51,287,618.53
2006	158,095	1,700,041	4,871,351	1,215,107	18,471,735	652,914	2,687,980	9,751,658	13,822,121	3,583,486	56,914,488.00
2007	178,540	2,015,128	5,505,759	1,623,943	20,235,994	732,057	3,091,993	10,287,618	14,464,228	4,149,534	62,284,794.00
2008	225,757	2,125,465	6,429,027	2,004,831	22,053,304	660,814	3,139,422	10,116,478	14,597,477	4,253,741	65,606,316.00
2009	157,464	2,161,577	6,323,730	2,008,363	23,646,191	762,547	3,017,099	9,681,259	14,149,841	3,772,259	65,680,330.00
2010	214,290	2,508,289	7,002,944	2,513,028	24,577,196	791,507	3,520,471	11,638,663	15,936,400	5,049,855	73,752,643.00
2011	242,061	2,881,862	7,649,731	2,723,564	24,714,324	816,369	3,917,454	13,171,303	19,098,323	6,014,031	81,229,022.00
2012	209,108	3,584,307	8,044,462	3,330,072	25,032,708	1,058,995	4,272,811	14,491,185	22,353,903	6,847,678	89,225,229.00
2013	3,279,160	4,210,165	8,802,129	3,779,490	25,715,500	2,044,307	4,681,307	15,567,916	26,546,725	7,572,352	102,199,051.00
2014	3,885,537	4,502,775	9,435,411	4,158,719	27,437,315	3,081,413	4,833,368	15,095,152	24,779,768	7,874,312	105,083,770.00
2015	218,213	4,775,231	10,406,759	4,684,429	25,721,251	4,681,020	5,360,682	15,231,469	29,881,091	7,943,651	108,903,796.00
2016	218,809	5,011,712	11,519,275	4,239,047	26,757,392	2,907,207	5,967,005	16,403,595	32,529,588	10,012,735	115,566,365.00
2017	258,955	5,602,157	14,039,799	3,868,838	25,948,459	3,443,133	6,620,908	17,424,611	35,591,978	12,922,151	125,720,989.00
2018	278,136	6,201,077	15,810,305	4,186,432	25,832,354	3,549,428	7,127,678	18,508,302	38,178,194	15,497,791	135,169,697.00
2019	333,244	6,610,592	16,106,954	4,791,065	26,100,784	4,364,101	8,260,913	18,999,298	39,916,251	18,008,591	143,491,793.00
2020	62,325	1,306,143	4,052,923	886,447	4,331,782	903,343	1,482,535	2,727,202	6,702,396	3,686,779	26,141,875.00

Sumber : ASEAN Stats Data Portal (ASEANStats, 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kunjungan paling besar ke negara-negara ASEAN ditempati oleh Malaysia dan Thailand yang kemudian disusul oleh Singapura dan Indonesia di posisi ketiga dan keempat. Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa kunjungan ke negara-negara ASEAN memang tergolong besar, dimana pengunjung ini datang dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN menjadi salah satu kawasan yang banyak diminati oleh dunia internasional, sehingga tidak mengherankan jika kawasan ini memiliki potensi besar yang harus mampu dikembangkan dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memaksimalkan sektor

pariwisatanya sebagai sarana pemasukan devisa negara. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam potensi pariwisata didalamnya yang selaras dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Hal tersebut didukung dengan kebijakan Joko Widodo pada tahun 2014 yang meluncurkan Kebijakan Poros Maritim, sebagai dasar dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Terdapat lima sektor yang menjadi sektor prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang meliputi sektor infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata (Ratman, 2016).

Dalam paparan mengenai Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 – 2019, pariwisata mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat di dunia. Berdasarkan data, pariwisata Indonesia di tahun 2014, pada sektor makro berkontribusi terhadap PDB baru pada angka 9% sedangkan jumlah devisa yang dihasilkan adalah sebesar 140 triliun rupiah. Sektor pariwisata juga memberi kontribusi pada kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Pada sektor mikro, indeks daya saing kepariwisataan Indonesia adalah #70 sedangkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara berjumlah 9 juta orang dan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 250 juta orang (Ratman, 2016).

Capaian percepatan ekonomi Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata membuat target dalam pencapaiannya. Target tersebut diharapkan mampu tercapai pada 2019. Target yang dicanangkan dari sisi makro antara lain

adalah peningkatan kontribusi terhadap PDB dari 9% menjadi 15%. Devisa negara yang awalnya hanya 140 triliun diharapkan dapat meningkat hingga level 280 triliun. Kontribusi terhadap kesempatan kerja juga diharapkan meningkat hingga 13 juta orang. Pada sisi mikro sendiri, target yang ingin dicapai meliputi indeks daya saing pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan asing menjadi 20 juta orang pada 2019, serta wisatawan nusantara yang ditargetkan mencapai angka 275 juta orang (Ratman, 2016).

Dengan kata lain, Pariwisata memberikan kontribusi sebesar 9,3 persen terhadap devisa nasional dibandingkan dengan industri-industri lainnya seperti batubara, gas bumi, minyak keapa sawit, dan lainnya. Selain itu, pariwisata telah berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja sebesar 9,8 juta (lapangan kerja), dan berada pada urutan keempat dibanding industri lainnya dalam hal kontribusi tenaga kerja. Dari informasi kontribusi pariwisata terhadap peningkatan perekonomian nasional, pemerintah meyakini bahwa pariwisata harus menjadi prioritas pengembangan perekonomian bangsa yang selayaknya diikuti oleh pemerintah daerah melalui langkah-langkah memajukan pariwisata daerah (Junaid, 2018). Berikut ini tabel yang menunjukkan perjalanan wisata yang ada di nusantara dalam kurun eaktu 2015-2018 yang dirangkum oleh Badan Pusat Statistik.

Gambar 1.2 Tabel Perjalanan Wisatawan Nusantara

Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			
	2015	2016	2017	2018
ACEH	3023768	4306217	4410969	6518831
SUMATERA UTARA	9464756	9398998	9364706	10345256
SUMATERA BARAT	5022693	5019290	5483028	6402187
RIAU	5517516	5076197	5149936	5552920
JAMBI	2019636	1774454	1906593	2242802
SUMATERA SELATAN	5039369	5807205	5948669	6137095
BENGKULU	2405938	1922418	1950249	2018556
LAMPUNG	6193525	6153283	6002487	6881006
KEP. BANGKA BELITUNG	2468705	3162558	3831465	5197635
KEP. RIAU	2279310	3077543	3805645	4611718
DKI JAKARTA	24134824	24046943	24840040	24967080
JAWA BARAT	44397263	43619718	43779162	53203387
JAWA TENGAH	38976233	40120408	41182591	43110598
DI YOGYAKARTA	6331609	6436655	6498739	7858137
JAWA TIMUR	40738635	43207169	43689273	53244287
BANTEN	9383584	9514226	9551703	13275125
BALI	8316585	8465669	8143614	6621617
NUSA TENGGARA	2723653	3002461	4134434	3192581
NUSA TENGGARA	2738457	2710541	2856531	2947381
KALIMANTAN BARAT	2987871	2944441	2996380	3257024
KALIMANTAN TENGAH	2356531	2362315	2398510	2745542
KALIMANTAN SELATAN	3450676	4271433	4300487	4520927
KALIMANTAN TIMUR	3849431	3132595	3205261	2613107
KALIMANTAN UTARA	-	708804	728373	634477
SULAWESI UTARA	2635068	2722230	2759200	4313069
SULAWESI TENGAH	3235758	3392641	3427266	2260800
SULAWESI SELATAN	8595079	8692154	8812173	9616232
SULAWESI TENGGARA	2914213	2968941	2963742	3370736
GORONTALO	829411	1222232	1206547	938557
SULAWESI BARAT	1832600	2133152	2119320	941944
MALUKU	813905	830921	863592	1206288
MALUKU UTARA	396047	491531	513206	615624
PAPUA BARAT	499017	601517	581002	686836
PAPUA	847340	1040658	1117110	1354526
INDONESIA	256419006	264337518	270822003	303403888

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa potensi kunjungan pariwisata nusantara cukup besar dari tahun ke tahun. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari potensi alam yang dimiliki oleh setiap provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki potensi yang Sulawesi Selatan yang akan menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini. Di tahun 2022, Sulawesi Selatan bahkan mencatatkan namanya sebagai provinsi yang meloloskan Desa Wisata ke 300 Besar Anugerah Desa Wisata 2022 (Sindo, 2022)

Adapun upaya pengembangan pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Indonesia adalah pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Bahkan, Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri yang berkunjung ke Sulawesi Selatan berjumlah 7.320.599 kunjungan pada tahun 2015 dan cenderung meningkat secara signifikan hingga berjumlah 8.656.317 kunjungan pada tahun 2018 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Hal ini tentu saja dapat dikembangkan potensinya dengan cara memanfaatkan *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) yang diadopsi oleh menteri pariwisata negara-negara ASEAN pada tahun 2012 dimana secara umum bertujuan untuk membangun *blueprint* terkait dengan kebijakan, program, dan proyek dalam area pemasaran, pengembangan produk, standar, pengembangan SDM, investasi, dan komunikasi antarnegara anggota ASEAN. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir ATSP telah memasuki

program terbarunya yaitu pelaksanaan dari ATSP tahun 2016 – 2025. Adapun salah satu wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar di Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar.

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar juga merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan , 2023).

Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembahasan tersebut dengan judul penelitian **“Peluang dan Tantangan Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang diangkat oleh penulis dalam pembahasan ini adalah mengacu pada implementasi ATSP tahun 2016-2025 dalam pengembangan pariwisata Kota Makassar. Oleh karena itu, sebagaimana

pembahasan yang peneliti telah uraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu

1. Bagaimana peluang implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar?
2. Bagaimana tantangan implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui peluang implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan tantangan implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar.

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini dapat berguna bagi penulis maupun bagi akademisi.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait “Peluang dan Tantangan Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)”.
2. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas “Peluang dan Tantangan Implementasi ATSP terhadap

Pengembangan Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)”.
Pariwisata di Kota Makassar)”.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan Konsep Efektivitas Rezim (*Regime Effectiveness*) dan Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Dalam menganalisis rumusan masalah pertama maupun kedua, terlebih dahulu peneliti akan menggunakan kedua konsep dalam memahami potensi dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ATSP dalam mengembangkan potensi pariwisata Kota Makassar, sehingga dengan ini dapat memudahkan peneliti dalam meneliti peluang dan tantangan dari implementasi ATSP tersebut. Kemudian peneliti menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan untuk memahami definisi dan indikator ketercapaian dari pariwisata berkelanjutan itu sendiri sehingga dengan hal tersebut peneliti akan lebih mudah dalam menganalisis aspek dan indikator yang ditetapkan dalam mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar.

1. Konsep Efektivitas Rezim (*Regime Effectiveness*)

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana peluang dan tantangan implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar. Terlebih dahulu peneliti menggunakan konsep efektivitas rezim (*Regime Effectiveness*) sebagaimana menurut Stephen D. Krasner

yaitu suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Krasner S. D., 1982). Namun, di sisi yang berbeda, rezim juga didefinisikan secara luas untuk membentuk semua hubungan internasional atau semua interaksi internasional dalam area masalah tertentu (ARI, 2018) sehingga disimpulkan bahwa rezim internasional adalah bentuk dari seluruh interaksi atau hubungan internasional yang memuat serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit dalam membahas bidang hubungan internasional tertentu.

Kemudian, untuk memudahkan analisis maka peneliti akan menganalisis tiap fase dari pelaksanaan ATSP dalam mengembangkan pariwisata Kota Makassar dengan menggunakan indikator dari Haas dan lainnya yaitu dimana setiap rezim perlu memeriksa tiga fase kegiatan yaitu agenda-setting, kebijakan internasional dan respons kebijakan nasional yang masing-masing mengacupada ketiga kondisi tersebut (P.M. Haas, 1993). Setelah menganalisis hal tersebut, maka peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai faktor beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan

karakteristik & kemampuan agen pelaksana sebagaimana menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep efektivitas rezim ini, peneliti mempertimbangkan dua definisi sebelumnya yaitu sebagaimana menurut Stephen D. Krasner dan Tayyar ARI sehingga menyimpulkan rezim sebagai bentuk dari seluruh interaksi atau hubungan internasional yang memuat serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit dalam membahas bidang hubungan internasional tertentu. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan indikator dari Haas dan lainnya mengenai tiga fase kegiatan yang diperhatikan dalam implementasi suatu rezim yaitu agenda-setting, kebijakan internasional dan respons kebijakan nasional yang masing-masing mengacu pada ketiga kondisi tersebut. Terakhir, peneliti menggunakan indikator dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005) mengenai faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik & kemampuan agen pelaksana.

2. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana peluang

dan tantangan implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar. Peneliti menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) untuk menganalisis aspek dan indikator yang ditetapkan dalam mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar.

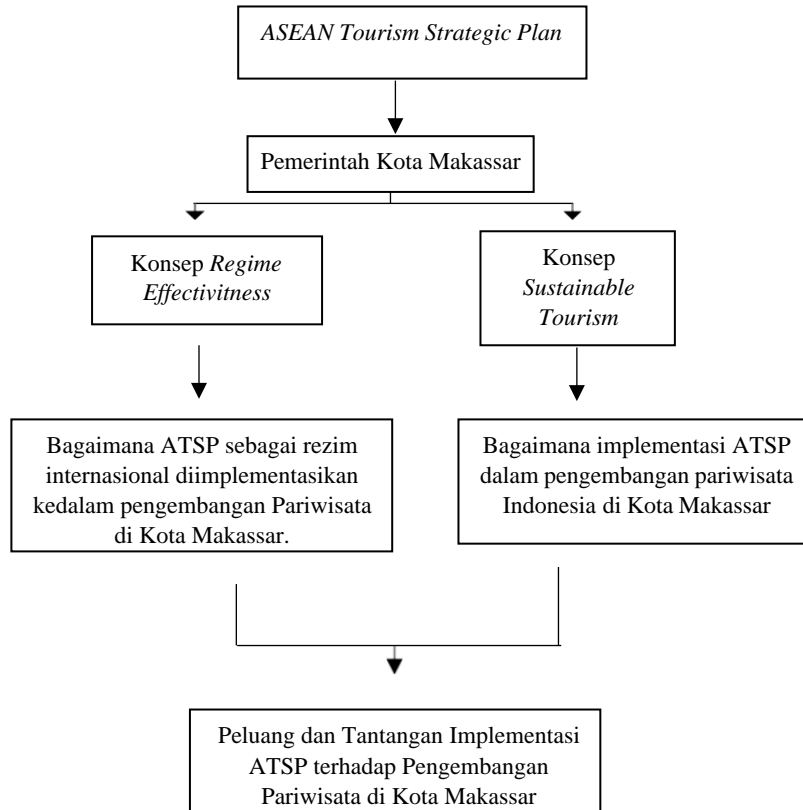
Peneliti menggunakan konsep Pariwisata berkelanjutan sebagaimana menurut Arida bahwa pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism* adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (Arida I. N., 2019). Kemudian, Peneliti memperhatikan sepuluh prinsip yang perlu diperhatikan menurut Arida yaitu meliputi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi (Arida N. S., 2017). Selanjutnya, peneliti menggunakan indikator menurut *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* untuk mengukur keseluruhan prinsip, aspek maupun komponen dari pariwisata berkelanjutan yaitu (i) Manajemen berkelanjutan; (ii) Dampak sosial

ekonomi; (iii) Dampak budaya; (iv) Dampak lingkungan (termasuk konsumsi sumber daya, mengurangi polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati dan lanskap) (GSTC, 2022).

E. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan pemanfaatan dari konsep yang akan digunakan dalam menganalisis isu yang diteliti dengan judul “Peluang dan Tantangan Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)”. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bagan 1 1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Selain itu, untuk memudahkan analisa dalam penelitian ini maka terdapat tabel operasional dari konsep yang digunakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tabel Operasional

Variabel Penelitian	Teori	Indikator	Pengukuran
		1. Kondisi Lingkungan	Adanya Lingkungan <i>socio-cultural</i> yang mendukung serta Keterlibatan Penerima Program

<p>Peluang dan Tantangan dari Implementasi ATSP di Kota Makassar (Variabel Bebas)</p>	<p>Konsep <i>Rezim Effectiviness</i> (Menurut Haas etc)</p>	<p>2. Hubungan Antar Organisasi</p> <p>3. Sumberdaya Organisasi untuk Implementasi Program</p> <p>4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana</p>	<p>Adanya Kordinasi dan Kerjasama antar Instansi bagi Keberhasilan Program</p> <p>Adanya Dukungan Sumberdaya baik SDM maupun non – SDM</p> <p>Adanya Struktur birokrasi, norma-norma dan Pola Hubungan Birokrasi yang Kondusif</p>
<p>Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar (Variabel Terikat)</p>	<p>Konsep <i>Sustainable Tourism</i> (Menurut World Commision on Environment Development)</p>	<p>1. Ecological Sustainability</p> <p>2. Social</p>	<p>Adanya pelestarian dan penjagaan sumber daya alam dari dampak negatif kegiatan pariwisata/manusia</p> <p>Adanya lingkungan bermasyarakat yang mendukung baik antar anggota kelompok masyarakat dengan</p>

		Adaptability	wisatawan atau antar sesama anggota kelompok masyarakat
		3. Cultural Sustainability	Adanya kepercayaan bahwa dampak kehadiran wisatawan tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan budaya setempat, malainkan harus dipertahankan untuk generasi yang akan datang

Sumber: Diolah oleh peneliti

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (natural), sehingga diperoleh data-data deskriptif dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif. Adapun penelitian yang diangkat adalah penelitian yang membahas mengenai Peluang dan Tantangan Implementasi ATSP terhadap Pengembangan Pariwisata di Indonesia

(Studi Kasus: Pengembangan Pariwisata di Kota Makassar)” dan diinterpretasikan menggunakan metode penulisan deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode Wawancara dan *Library Research* dimana wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini serta *library research* dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau dokumen pemerintah yang membahas mengenai *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)*, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet yang didalamnya membahas mengenai perkembangan kebijakan *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)*.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. BAB ini berisikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. BAB ini berisikan kajian suatu teori dengan judul atau topik penelitian yang akan diteliti yaitu konsep rezim internasional dan konsep pariwisata berkelanjutan.

BAB III Gambaran Umum. BAB ini berisikan gambaran umum dan data relevan mengenai topik yang akan diangkat oleh peneliti.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. BAB ini berisikan hasil analisis mengenai peluang Indonesia dalam mengimplementasikan *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) terhadap pengembangan pariwisata Indonesia di Kota Makassar dan tantangan implementasi *ASEAN Tourism Strategic Plan* (ATSP) terhadap pengembangan pariwisata Indonesia di Kota Makassar.

BAB V Penutup. BAB ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan penutup dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rezim *Effectiveness*

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan internasional terdapat beberapa aktor yang terlibat didalamnya yaitu aktor negara dan non negara, dimana salah satu aktor non negara adalah rezim internasional. Pada awalnya, Rezim Internasional dipahami sebagai hal yang dapat mengatur wilayah-wilayah di luar hak kedaulatan negara. Namun, seiring waktu hal tersebut berkembang sehingga Rezim Internasional telah dapat memasuki berbagai ranah atau ruang lingkup sehingga pemanfaatannya lebih maksimal dapat dirasakan ke berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian konsep rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana harapan aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu (Krasner S. D., 1982).

Sebelumnya, pembahasan mengenai rezim perlu mempertimbangkan aspek empiris seperti ruang lingkup, kompleksitas, tema regulasi serta dinamika politik dan kepemimpinan yang terkait dengan pembentukan dan efektivitasnya (Hynek, 2017). Selain itu, dengan mempertimbangkan korelasi antara fakta yang terjadi dan pendekatan teoritis yang berusaha untuk menjelaskan perubahan dalam sistem internasional selama beberapa dekade (Zacareli, 2017) terakhir maka perlunya kehadiran suatu rezim berskala

internasional untuk mengatasi perubahan yang terjadi belakangan ini.

Secara historis, antara tahun 1980 dan 1990, konsep rezim internasional menjadi terkenal dan menjadi populer di berbagai program pascasarjana ilmu politik dan hubungan internasional. Cakupan konsep rezim internasional komprehensif dan berhasil di beberapa bidang, dan digunakan lebih hemat di bidang lain. Dalam hal keamanan kolektif, konsep rezim internasional memiliki pegangan yang rendah dan mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Adapun dalam bidang ekonomi politik internasional, konsep rezim internasional semakin mendapat pegangan dimana peluang kerjasama internasional telah terbuka karena ketidakseimbangan ekonomi makro pada tahun 1970-an. Konsep tersebut berhasil dalam berbagai tema, dan memastikan popularitasnya di kalangan sarjana hubungan internasional. Oleh karena itu, ekonomi politik internasional merupakan wilayah yang sempurna untuk penyebaran rezim internasional pada 1980-an dan 1990-an. Namun, konteks saat ini telah mengubah rezim internasional menjadi lebih mewujudkan klaim normatif tentang subjek baru yang menjadi bagian dari disiplin ilmu hubungan internasional kontemporer (Zacareli, 2017).

Hal ini sejalan dengan pandangan menurut Tayyar Ari dalam bukunya *“Theories of International Relations”* yang mengatakan bahwa dalam kondisi kontemporer ini, negara harus membangun rezim di wilayah kekuasaan mereka dimana rezim internasional dapat dibentuk di setiap ruang lingkup

dalam hubungan internasional mulai dari masalah keamanan hingga masalah lingkungan dan mungkin terdiri dari seluruh peraturan internasional dan standar umum, yang kemudian hal ini diperkuat dengan pengertian rezim internasional menurut Robert Keohane yang menganggap bahwa teori rezim sebagai teori untuk menjelaskan dan memahami kerjasama internasional yang bertujuan untuk koordinasi dan harmonisasi kepentingan antar negara (ARI, 2018).

Stephen D. Krasner berpendapat bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Krasner S. D., 1982). Namun, di sisi yang berbeda, rezim didefinisikan secara luas untuk membentuk semua hubungan internasional atau semua interaksi internasional dalam area masalah tertentu (ARI, 2018). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa rezim internasional adalah bentuk dari seluruh interaksi atau hubungan internasional yang memuat serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit dalam membahas bidang hubungan internasional tertentu.

Teori rezim internasional menunjukkan bahwa kerjasama dimungkinkan dalam lingkungan di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk memaksa negara-negara untuk bekerja sama. Menurut Keohane, teori

rezim adalah teori untuk menjelaskan dan memahami kerjasama internasional yang bertujuan untuk koordinasi dan harmonisasi kepentingan antar negara. Bahkan, kerjasama internasional yang berarti saling harmonisasi kebijakan yang menguntungkan semua pihak banyak terlihat dalam politik dunia. Namun, Perritt dalam Tayyar (ARI, 2018) mengklaim bahwa teori rezim memperkenalkan pendekatan baru yang menunjukkan kemungkinan kerjasama bahkan dalam keadaan tersebut.

Adapun dalam menganalisis keefektifan dari suatu rezim, maka perlu untuk menganalisis efektivitas dari suatu rezim tersebut. Menurut Underdal, suatu organisasi (rezim) dianggap efektif Ada minat yang berkembang pada aspek efektivitas rezim, tetapi ini adalah masalah perdebatan karena definisi yang sangat berbeda digunakan, menghasilkan cara yang berbeda untuk memperkirakan efektivitas. Seperti yang diamati Kütting (Kutting, 2000)

"Within the effectiveness debate in regime theory... on one level effectiveness is seen in terms of institutional workings through good institutional structures... on another level effectiveness is measured on the basis of environmental impact. "

Dalam perdebatan efektivitas dalam teori rezim... pada satu tingkat efektivitas dilihat dari segi kerja kelembagaan melalui struktur kelembagaan yang baik... pada tingkat lain efektivitas diukur berdasarkan dampak lingkungan. "

Namun, baru-baru ini telah ada upaya oleh Kütting (Kutting, 2000) untuk memperkenalkan konsep efektivitas lingkungan ketika mempelajari

rezim lingkungan dengan membedakan konsep efektivitas seperti yang terlihat dalam istilah kelembagaan dari akuntansi untuk peningkatan kualitas lingkungan, meskipun masih memiliki perspektif teori rezim. Selain itu, upaya untuk mengukur efektivitas terutama bersifat kualitatif. Metode kualitatif ini bervariasi dalam apakah pandangan mereka deskriptif (mencoba menjelaskan apa yang terjadi), prediktif (mencoba memperkirakan apa yang akan terjadi), normatif (melihat apa yang idealnya terjadi) atau penjelasan (mencoba menjelaskan alasan mengapa sesuatu terjadi) (Bernauer, 2002).

Untuk memperkirakan apakah lembaga lingkungan internasional efektif, Haas et al. (P.M. Haas, 1993) merujuk pada kondisi tertentu yang dikenal sebagai tiga C. Mereka mengukur dampak lembaga internasional pada tiga kondisi penting untuk tindakan efektif dalam masalah lingkungan: tingkat perhatian pemerintah yang tinggi, lingkungan kontraktual yang ramah dimana perjanjian dapat dibuat dan disimpan, dan kapasitas politik dan administrasi yang memadai dalam pemerintahan nasional. Dalam setiap rezim mereka memeriksa tiga fase kegiatan; agenda-setting, kebijakan internasional dan respons kebijakan nasional yang masing-masing mengacu pada ketiga kondisi tersebut. Dengan demikian suatu rezim dianggap efektif jika meningkatkan Kepedulian pemerintah, meningkatkan lingkungan Kontraktual dan membangun Kapasitas nasional.

Agenda-setting adalah merupakan sebuah pengaturan atas agenda-agenda pemerintah terkait masalah yang dihadapinya. Agenda adalah

kumpulan masalah, pemahaman tentang penyebab, simbol, solusi, dan elemen lain dari masalah publik yang menjadi perhatian anggota masyarakat dan pejabat pemerintah. Adapun Agenda setting adalah proses dimana masalah dan solusi alternatif mendapatkan atau kehilangan perhatian publik dan elit (Frank Fischer, 2007). Agenda-Setting dengan demikian menjadi titik awal untuk mengidentifikasi isu-isu dan kemungkinan instrumen kebijakan. Tahap pertama melibatkan identifikasi masalah dan memastikan bahwa itu mendapat perhatian pembuat kebijakan (Tendengu, 2021).

Kebijakan internasional mengacu pada kebijakan asing yang turut mempengaruhi kebijakan nasional. Singkatnya, kebijakan luar negeri/internasional adalah serangkaian tindakan dan input yang dibuat suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dan untuk mengejar tujuan kepentingan nasionalnya. Menurut C.C Rodee, Anderson dan Christol, kebijakan luar negeri menyiratkan formulasi dan implementasi sekelompok prinsip yang membentuk pola perilaku suatu negara saat bernegosiasi dengan negara lain untuk melindungi atau memajukan kepentingannya sendiri.

Respon kebijakan nasional merupakan bentuk lanjutan dari kebijakan internasional sebelumnya. Dimana dalam hal ini, respon kebijakan nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik. Untuk mendapatkan beberapa pemahaman tentang kebijakan publik, yang merupakan konsep yang sangat heterogen dan juga bidang ilmu sosial yang menampilkan sejumlah pendekatan yang berbeda maka perlu diketahui bahwa secara substantif,

kebijakan publik telah mengalami beberapa perubahan mendasar selama beberapa dekade terakhir dalam hal desain kebijakan, pemilihan instrumen kebijakan dan peran negara dalam masyarakat secara lebih luas (Pierre, 2006)

Rezim internasional, dalam sikap pertama, dipahami untuk mengatur daerah-daerah di luar hak berdaulat negara. Tetapi, saat ini, negara mungkin harus membangun rezim dalam domain kekuasaan mereka. Salah satu contoh tertentu dari situasi ini adalah dengan membentuk rezim di bidang hak asasi manusia dan lingkungan. Namun, rezim internasional dapat dibentuk di setiap bidang subjek hubungan internasional mulai dari masalah keamanan hingga masalah lingkungan, dan dapat terdiri dari semua peraturan internasional dan standar umum, seperti rezim yang terkait dengan laut, luar angkasa, selat dan sungai dan saluran air lainnya serta subjek ekonomi, keuangan dan komersial atau bahkan tentang perilaku diplomatik. Misalnya, rezim selat, rezim sungai dan saluran air, rezim perdagangan internasional, rezim pembayaran internasional dan rezim lingkungan internasional ada dan sering digunakan untuk menjelaskan aturan yang mengatur daerah-daerah tersebut.

Namun, dapat dinyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, negara tidak perlu membentuk rezim untuk mengoordinasikan kerja sama mereka atau menghilangkan konflik: Pertama, negara tidak perlu membentuk rezim, jika mereka memiliki kesempatan untuk berperilaku sepihak tanpa membahayakan kepentingan orang lain. Kedua, jika negara-negara yang memiliki kepentingan bersama dapat berperilaku dengan cara yang sama, mereka tidak memerlukan

rezim internasional. Akhirnya, jika strategi terbaik dari satu negara adalah yang lebih baik dari strategi terburuk dari yang lain, maka negara tidak perlu membentuk rezim untuk bertindak dengan cara yang sama (ARI, 2018).

Namun, perlu diketahui bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlunya pemanfaatan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

1. Kondisi lingkungan, dimana lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program;
2. Hubungan antar organisasi, implementasi sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain sehingga diperlukan kordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources);
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, dimana ini mencakup

struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

B. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (Arida I. N., 2019). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga tentu memiliki prinsip yang perlu diketahui dimana prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewartakan tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi (Arida N. S., 2017).

1. Partisipasi : Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumberdaya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

2. Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement* : Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
3. Kepemilikan Lokal : Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat.
4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan : Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan.
5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat : Tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud.
6. Daya Dukung : Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya yang harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan.
7. Monitor dan Evaluasi : Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan

batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata yang meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas : Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.
9. Pelatihan : Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional.
10. Promosi : Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat.

Menurut *United Nations – World Tourism Organization (UNWTO)*, Pedoman dan praktik manajemen pengembangan pariwisata berkelanjutan berlaku untuk semua bentuk pariwisata di semua jenis destinasi, termasuk pariwisata massal dan berbagai segmen pariwisata khusus. Prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus ditetapkan antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan harus melakukan hal-hal berikut yaitu (UNEP & UNWTO, 2005):

1. Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, menjaga proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
2. Menghormati keaslian sosial-budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang mereka bangun dan hidup, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya.
3. Memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang memperoleh penghasilan serta layanan sosial bagi komunitas tuan rumah, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Secara historis, konsep mengenai pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, konsep tersebut di perkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 yaitu “*Sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*” dimana dalam hal ini pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kemudian, konsep tersebut diadopsi kedalam konsep pembangunan

pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yaitu “*Form of tourism that are consistent with natural, social, and community values and which allow both host and guest to enjoy positive and worthwhile interaction and shared experience*”. (Suwena, 2010).

Konsep tersebut merupakan kelanjutan dari konsep sebelumnya yang tidak hanya berfokus kepada pembangunan secara umum seperti ekologi dan ekonomi. Namun juga menyorot kepada aspek kebudayaan. Hal ini sebagaimana menurut Suwena yang mengategorikan kegiatan wisata dapat dianggap berkelanjutan memenuhi empat prinsip yaitu Pertama, secara ekologi berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat; Kedua, secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial; Ketiga, secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan); Keempat, secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang didapati dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwena, 2010).

Konsep tersebut kemudian terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kondisi kontemporer. Sebagaimana menurut Burns dan Holden (Holden, 1997) yang mengadaptasikan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk bidang pariwisata sebagai model yang diintegrasikan dengan lingkungan fisik (*place*), lingkungan budaya (*host community*), dan

wisatawan (*visitor*) sehingga prinsip sebelumnya menjadi tujuh prinsip yaitu sebagai berikut.

Pertama, lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa berfungsi sebagai aset wisata; Kedua, pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang positif yang memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan, lingkungan, dan wisatawan itu sendiri; Ketiga, hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang; Keempat, aktivitas pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala/ukuran alam dan karakter tempat-tempat kegiatan dilakukan; Kelima, keharmornisan harus dibangun diantara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan dan masyarakat; Keenam, Adaptasi terhadap perubahan; Ketujuh, industri pariwisata, pemerintah lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Suwena, 2010).

Kemudian, konsep tersebut berkembang sebagaimana menurut Mowforth dan Munt, bahwa konsep Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Development*) meliputi tiga komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, diantaranya :

- i. *Ecological Sustainability*. Dalam hal ini, Pembangunan kepariwisataan tidak disebabkan oleh perubahan yang *irreversible* dalam suatu ekosistem yang telah ada dan menjadi dimensi yang secara umum diterima sejak adanya kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam dari dampak negatifkegiatan pariwisata.

- ii. *Social Adaptability*. Dalam hal ini, adanya kemampuan dan kemauan kelompok untuk menyerap wisatawan tanpa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial, baik antar anggota kelompok masyarakat dengan wisatawan atau antar sesama anggota kelompok masyarakat.
- iii. *Cultural Sustainability*. Dalam hal ini, adanya kepercayaan bahwa dampak kehadiran wisatawan tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan budaya setempat, melainkan harus dipertahankan untuk generasi yang akan datang (Waimbo, 2012)

Menurut *Global Sustainable Tourism Council, Sustainable Tourism* mengacu pada praktik berkelanjutan di dalam dan oleh industri pariwisata. Hal ini merupakan aspirasi untuk mengakui semua dampak pariwisata, baik positif maupun negatif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif (Global Sustainable Tourism Council, 2023). *Sustainable Tourism* juga didefinisikan oleh Program Lingkungan PBB dan Organisasi Pariwisata Dunia PBB sebagai "pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya saat ini dan di masa depan, yang memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah."

Selain itu, mereka mengatakan bahwa pariwisata berkelanjutan "mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun

antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya" (Global Sustainable Tourism Council, 2023). Mereka adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan bahasa umum tentang keberlanjutan dalam pariwisata yang sesuai dengan kriteria GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) sehingga secara umum pariwisata berkelanjutan dapat dikategorikan dalam empat pilar yaitu (i) Manajemen berkelanjutan; (ii) Dampak sosial ekonomi; (iii) Dampak budaya; (iv) Dampak lingkungan (termasuk konsumsi sumber daya, mengurangi polusi, dan melestarikan keanekaragaman hayati dan lanskap) (GSTC, 2022).

Kriteria GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) berfungsi sebagai standar global untuk keberlanjutan dalam perjalanan dan pariwisata. Kriteria digunakan untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran, pembuatan kebijakan untuk bisnis dan lembaga pemerintah dan jenis organisasi lainnya, pengukuran dan evaluasi, dan sebagai dasar untuk sertifikasi. Kriteria tersebut dibangun berdasarkan pekerjaan, pengalaman dan mempertimbangkan berbagai pedoman dan standar untuk pariwisata berkelanjutan dari setiap benua dimana dalam proses pengembangan, telah dikonsultasikan secara luas di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, dalam beberapa bahasa. Hal ini dilakukan untuk mencapai konsensus global tentang pariwisata berkelanjutan. Kriterianya pun adalah kriteria adalah minimum yang harus dicapai oleh bisnis, pemerintah, dan destinasi untuk mendekati keberlanjutan sosial, lingkungan, budaya, dan ekonomi. Hal ini disebabkan tujuan wisata

masing-masing wilayah memiliki budaya, lingkungan, adat istiadat, dan hukumnya sendiri, yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi setempat dan dilengkapi dengan kriteria tambahan untuk lokasi dan aktivitas tertentu (GSTC, 2022).

Adapun secara spesifik, keempat pilar yaitu manajemen berkelanjutan; dampak sosial ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan dikonversikan kedalam empat struktur kriteria yaitu bagian pengelolaan berkelanjutan; keberlanjutan sosial-ekonomi; keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan dengan sub-sub bagian masing-masing yaitu sebagai berikut (GSTC, 2019).

1. Pengelolaan Berkelanjutan

- a. Struktur dan Kerangka Pengelolaan

- 1) Tanggungjawab Pengelolaan Destinasi;
 - 2) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Destinasi;
 - 3) Monitoring dan Pelaporan.

- b. Pelibatan Pemangku Kepentingan

- 1) Pelibatan Badan Usaha dan Standar Keberlanjutan;
 - 2) Pelibatan dan Umpan Balik dari Penduduk Setempat;
 - 3) Pelibatan dan Umpan Balik dari Pengunjung;
 - 4) Promosi dan Informasi.

- c. Mengelola Tekanan dan Perubahan

- 1) Mengelola Jumlah dan Kegiatan Pengunjung;
- 2) Perencanaan Peraturan dan Pengendalian Pembangunan;
- 3) Adaptasi Perubahan Iklim;
- 4) Pengelolaan Risiko dan Krisis.

2. Keberlanjutan Sosial-Ekonomi

a. Memberikan Manfaat Ekonomi Lokal

- 1) Mengukur Kontribusi Ekonomi Pariwisata;
- 2) Peluang Kerja dan Karir;
- 3) Menyokong Kewirausahaan Lokal dan Perdagangan yang Berkeadilan.

b. Kesejahteraan dan Dampak Sosial

- 1) Dukungan bagi Masyarakat;
- 2) Pencegahan Eksploitasi dan Diskriminasi;
- 3) Hak Kepemilikan dan Pengguna;
- 4) Keselamatan dan Keamanan;
- 5) Akses untuk Semua.

3. Keberlanjutan Budaya

a. Melindungi Warisan Budaya

- 1) Perlindungan Aset Budaya;
- 2) Artefak Budaya;
- 3) Warisan Tak Benda;
- 4) Akses Tradisional;

- 5) Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Mengunjungi Situs Budaya
 - 1) Pengelolaan Pengunjung pada Situs Budaya;
 - 2) Interpretasi Situs.
4. Keberlanjutan Lingkungan
- a. Konservasi Warisan Alam
 - 1) Perlindungan Lingkungan Sensitif;
 - 2) Pengelolaan Pengunjung pada Situs Alam;
 - 3) Interaksi dengan Kehidupan Liar;
 - 4) Eksploitasi Spesies dan Kesejahteraan Satwa.
 - b. Pengelolaan Sumberdaya
 - 1) Konservasi Energi;
 - 2) Penatalayanan Air;
 - 3) Kualitas Air.
 - c. Pengelolaan Limbah dan Emisi
 - 1) Air Limbah;
 - 2) Limbah Padat;
 - 3) Emisi GRK dan Mitigasi Perubahan Iklim;
 - 4) Transportasi Berdampak Rendah;
 - 5) Pencemaran Cahaya dan Kebisingan.